

ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BITUNG

Oleh:

Astria Nur Jannah Dien¹
Jantje Tinangon²
Stanley Walandouw³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: Dienastrhy@yahoo.co.id
²tjantjejanny@yahoo.com
³Stanley.walandouw@yahoo.com

ABSTRACT

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang posisi keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan serta menunjukkan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada pengguna. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Pendapatan Kota Bitung dianalisis dari LRA tahun anggaran 2009-2013. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi. Data diperoleh melalui studi lapangan. Hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan PAD di Dinas Pendapatan Kota Bitung Tahun Anggaran 2009-2013 sangat efektif, namun tingkat dan kriteria efisiensi anggaran belanja secara keseluruhan kurang efisien dikarenakan penggunaan anggaran belanja yang terlalu tinggi. Diharapkan pimpinan Dinas Pendapatan Kota Bitung lebih mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk memperbaiki pengelolaan dalam penggunaan anggaran belanja agar lebih ditingkatkan efisiensinya.

Kata kunci: *efektivitas, efisiensi, kinerja keuangan*

ABSTRACT

Budget realization report is to provide information about the financial position is beneficial for most users report in order to make decisions and demonstrate accountability for the use of the resources entrusted to the user. The purpose of this study is to determine the financial performance of (Earning Department of Bitung City) analyzed from the LRA fiscal year 2009-2013. The method used is quantitative descriptive analysis by using the ratio of effectiveness and efficiency. Data obtained by conducting field studies. The results are that the level and effectiveness of PAD acceptance criteria in (Earning Department of Bitung City) for Fiscal Year 2009-2013 is very effective, but the level and efficiency criteria budgets overall less efficient due to the use of the budget is too high. Hopefully the leader of (Earning Department of Bitung City) more optimize all available resources to improve the management of using the budget to be more efficiency.

Keywords: *effectiveness, efficiency, financial performance*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mewujudkan *Good Governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 yang dikenal dengan sebutan otonomi daerah, kemudian untuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dikeluarkan juga UU No. 33 Tahun 2004 dan tentunya kedua UU ini erat kaitannya karena secara otomatis dengan adanya peralihan wewenang pemerintah dari pusat ke daerah maka harus diikuti dengan penyerahan keuangan yang dipercayakan pemerintah pusat untuk bisa mengolah keuangan dari masing-masing daerah. Memang kehadiran UU No. 33 Tahun 2004 telah membawa dampak yang besar dan cukup mendasar dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Dalam konsiderannya UU ini menyatakan antara lain bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berupa system keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan.

Permendagri No. 56 Tahun 2007 mendefinisikan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam Kerangka Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan/instansi, dimana fungsinya untuk mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan/ instansi. Laporan realisasi anggaran adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumpulan dan pengelolaan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau mengambil keputusan.

Tujuan dari pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya, menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi, dan menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan (Bastian, 2010: 297).

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung dianalisis dari laporan realisasi anggaran periode 2009 sampai 2013.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pemerintahan

Halim (2013:1) menyatakan bahwa Akuntansi keuangan (Pemerintahan) daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi tahun 1998. Akuntansi pemerintahan adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya (Mursyidi, 2009:1).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan (Halim, 2013:43).

Laporan Realisasi Anggaran

PP No. 24 Tahun 2005 laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintahan pusat/ daerah dalam suatu periode pelaporan. Lebih lanjut, dalam laporan realisasi anggaran setidaknya menyajikan unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit, pembiayaan, sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran.

Definisi Anggaran

Mahsun (2013:145) menyatakan bahwa anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkret. Usulan anggaran pada umumnya ditelaah atau direview terlebih dahulu oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijadikan anggaran formal. Anggaran adalah alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Efektifitas

Mardiasmo (2009:132) menyatakan bahwa efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Efisiensi

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan (Mardiasmo, 2009:132).

Penilaian Kinerja Keuangan Sektor Publik

Sistem Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

Penelitian Terdahulu

1. Sumenge (2013) dengan judul Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja badan perencanaan pembangunan daerah Minahasa Selatan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Bappeda Kab. Minahasa Selatan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2010 dan yang terendah pada tahun 2011 pelaksanaan anggaran belanja Bappeda tahun 2008-2012 secara keseluruhan sudah efisien.
2. Bisma dan Susanto (2010) dengan judul Evaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah Prov. Nusa Tenggara Barat Anggaran 2003-2007. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah Prov. NTB Tahun anggaran 2003-2007. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prov. NTB pada tahun anggaran 2003-2007 menggambarkan kinerja yang tidak optimal. Efektivitas pengelolaan APBD sangat efektif, namun efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil tidak efisien.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu, berupa studi kasus dan studi pustaka. Studi kasus dilakukan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Sedangkan studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data data dari literatur-literatur yang relevan dengan sistem akuntansi penyajian laporan realisasi anggaran.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Bertempat di jalan Sam Ratulangi Kota Bitung dan waktu penelitian dimulai pada bulan November 2014.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Menentukan judul dan merumuskan masalah.
2. Mengumpulkan data sesuai dengan data yang diangkat
3. Pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak - pihak yang terkait serta pengambilan data – data kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung untuk mengetahui bagaimana penyajian Laporan Realisasi Anggaran.
4. Mengolah data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data.
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Sugiyono (2009:206) menyatakan bahwa analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD} \times 100\%}{\text{Target penerimaan PAD}}$$

Sumber: Mahsun (2013).

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas penerimaan PAD sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka penerimaan PAD dikatakan sangat efektif
2. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka penerimaan PAD dikatakan efektif
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka penerimaan PAD dikatakan cukup efektif
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka penerimaan PAD dikatakan kurang efektif
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka penerimaan PAD dikatakan tidak efektif

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan total anggaran belanja.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja} \times 100\%}{\text{Anggaran Belanja}}$$

Sumber: Mahsun (2013)

Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas penerimaan PAD sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien
2. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung merupakan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bitung yang melaksanakan tugasnya di bidang pendapatan daerah. Sesuai tugasnya, maka Dispenda Kota Bitung merupakan koordinator pendapatan yang dilakukan oleh semua Unit pengelola pendapatan yang ada di Kota Bitung.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Bitung

Peraturan Walikota Bitung Nomor 33 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, maka Dinas pendapatan Daerah Kota Bitung bertugas melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Daerah di Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam kaitannya dengan tugas tersebut Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan :

1. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan koordinasi teknis dan tugas-tugas yang diserahkan oleh Kepala Daerah sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah.
3. Melakukan Penetapan besarnya Pajak dan Retribusi Daerah.
4. Melakukan Administrasi atas pungutan dan Penyetoran Pajak, Retribusi Daerah serta Penerimaan Pendapatan Lainnya.
5. Melakukan Koordinasi dan Pengawasan pekerjaan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta Penerimaan Pendapatan Lainnya.
6. Melakukan penyuluhan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pendapatan daerah, Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Retribusi Daerah serta Penerimaan Pendapatan Lainnya.
7. Melakukan urusan Tata Usaha dan menyusun Rencana Kerja Anggaran Dinas.
8. Mempersiapkan Ketentuan Pelaksanaan dalam Bidang Pendapatan dan menyusun Laporan mengenai segala kegiatan dalam lingkungan Dinas.

Hasil Penelitian

Tingkat Efektivitas Penerimaan PAD Dinas Pendapatan Kota Bitung Tahun Anggaran 2009-2013 diukur menggunakan rasio efektivitas dari Laporan Realisasi Anggaran Dispenda Kota Bitung yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2009-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2009	5.985.769.150	6.254.086.159	104,5	Sangat Efektif
2010	6.350.000.000	7.918.888.902	124,7	Sangat Efektif
2011	11.277.205.000	15.419.397.097	136,7	Sangat Efektif
2012	14.460.500.000	17.723.643.955	122,6	Sangat Efektif
2013	16.888.970.257	26.162.693.540	154,9	Sangat Efektif

Sumber: Data olahan Dinas Pendapatan, Kota Bitung

Tabel 1 menunjukkan bahwa selama periode tahun anggaran 2009-2013, tingkat efektivitas penerimaan PAD bersifat tetap atau stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung mampu memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah paling efektif yakni sebesar 154,9% sesuai dengan yang ditargetkan dengan rasio efektifitas diatas 100%.

Tabel 2. Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Dispenda Kota Bitung

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)	Kriteria
2009	5.914.307.019	5.352.446.692	90,5	Kurang Efisien
2010	5.821.080.761	5.569.043.614	95,7	Kurang Efisien
2011	5.548.558.880	5.404.194.541	97,4	Kurang Efisien
2012	7.850.133.538	7.614.755.945	97	Kurang Efisien
2013	9.140.512.913	8.541.527.247	93,4	Kurang Efisien

Sumber: Data Olahan Dinas Pendapatan, Kota Bitung

Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi anggaran belanja pada Dinas Pendapatan Kota Bitung kurang efisien dari tahun ke tahun. Tahun 2011 merupakan tingkat tertinggi ketidak efisiensinya pelaksanaan anggaran belanja di dinas pendapatan kota bitung yang mencapai hingga 97,4%.

Pembahasan

Penilaian kinerja keuangan Dinas Pendapatan Kota Bitung berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kota Bitung menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bisma dan Susanto, (2010) yaitu Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Prov. Nusa Tenggara Barat Anggaran 2003-2007 dan penelitian terdahulu yang dilakukan Sumenge, (2013) yaitu Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Minahasa Selatan dijadikan sebagai acuan karena penelitian kali ini berbeda dimana menggunakan Laporan Realisasi Anggaran dalam menilai kinerja keuangan Dinas Pendapatan Kota Bitung menggunakan alat ukur rasio efektivitas dan efisiensi, maka diperoleh tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan PAD di Dinas Pendapatan Kota Bitung Tahun Anggaran 2009-2013 sangat efektif, namun tingkat dan kriteria efisiensi anggaran belanja secara keseluruhan kurang efisien dikarenakan penggunaan anggaran belanja yang terlalu tinggi dan tingkat efisiensi yang hampir mendekati 100%.

Efektivitas Anggaran Realisasi Penerimaan PAD

Rasio Efektivitas Anggaran menggambarkan kemampuan satuan kerja dalam merealisasikan anggaran yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan realisasi yang ada. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan realisasi anggaran yang semakin baik. Adapun perhitungan efektivitas anggaran berdasarkan angka - angka pada laporan realisasi anggaran tahun 2009-2013 di Satuan Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung dengan hasil perhitungan dari rasio dapat diketahui bahwa efektivitas realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2009 adalah 1,045 atau 104,5 % , tahun 2010 adalah 1,247 atau 124,7 % , tahun 2011 adalah 1,367 atau 136,7 % , tahun 2012 adalah 1,226 atau 122,6 % , dan pada tahun 2013 adalah 1,549 atau 154,9 % .

Efisiensi Keuangan Anggaran Belanja

Rasio yang menggambarkan perbandingan antara total realisasi pengeluaran (belanja) satu periode dengan anggaran yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja keuangan semakin baik. Adapun perhitungan efisiensi keuangan di Satuan Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung dengan hasil perhitungan dari rasio ini dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi realisasi belanja pada tahun 2009 adalah 0,905 atau 90,5 % , tahun 2010 adalah 0,957 atau 95,7 % , tahun 2011 adalah 0,974 atau 97,4 % , tahun 2012 adalah 0,970 atau 97 % , dan pada tahun 2013 adalah 0,934 atau 93,4 % .

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini:

1. Tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Kota Bitung Tahun Anggaran 2009-2013 sangat efektif dari tahun ke tahun.
2. Dilihat dari hasil perhitungan rasio efektivitas menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung mampu memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan dengan tingkat efektivitas diatas 100%.
3. Tingkat dan kriteria efisiensi anggaran belanja Dinas Pendapatan Kota Bitung Tahun Anggaran 2009-2013 secara keseluruhan kurang efisien dari tahun ke tahun.
4. Dilihat dari hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukkan bahwa Dinas Kota Bitung kurang mengefisiensikan penggunaan anggaran belanja sesuai yang ditargetkan dengan tingkat efisiensi yang hampir mendekati 100%.

Saran

Saran dari penelitian ini sebagai dasar pertimbangan bagi pimpinan dan staff di Satuan Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung yaitu lebih mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk memperbaiki pengelolaan dalam penggunaan anggaran belanja agar lebih ditingkatkan efisiensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPEDA, Bitung. 2014. Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2009-2013. Kota Bitung.
- Bisma dan Susanto. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003–2007. Universitas Mataram. Mataram. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. Vol 4. No. 3. (2010). <http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/12.-I-Dewa-Gde-Bisma>. Diakses pada 20 September 2014. Hal. 75-86.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Republik Indonesia. 1996. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta, Bandung.
- Sumenge, Ariel. 2013. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA*. Vol 1, No 3. (2013). <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1941/1538>. Diakses pada 20 September 2014. Hal. 74-81.